

LAPORAN KINERJA TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BINTAN

TANJUNGPINANG,
JANUARI 2025

Daftar Isi

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Perencanaan Kinerja

BAB III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran

BAB IV : Penutup

BAB I

Pendahuluan

A. Penjelasan Umum Organisasi

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bintan dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008. KPP Pratama Bintan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 22 Kota Tanjungpinang, secara struktural berada di bawah Kantor Wilayah DJP Kepulauan Riau yang berkedudukan di Kota Batam.

Sebelum berubah strukturnya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Pratama, semula kantor yang beralamat di lokasi ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Tanjung Pinang. Wilayah kerja KPP Pratama Bintan adalah Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh satu Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Dabo Singkep. KP2KP Dabo Singkep berkedudukan di Dabo dengan alamat kantor Jalan Pahlawan No. 8 Dabo Singkep dengan wilayah kerja Kabupaten Lingga.

B. Aspek Strategis Organisasi

1. Wilayah Kerja Yang Luas

Wilayah kerja KPP Pratama Bintan meliputi Kabupaten Bintan yang secara geografis berlokasi di 0°6'17" Lintang Utara - 1°34'52" Lintang Selatan dan 104°12'47" Bujur Timur 108°2'27" Bujur Barat dengan luas wilayah:

Lautan	86.398,33	km ²
Daratan	1.319,51	km ²
Luas Total	87.717,84	km ²

Batas wilayah utara adalah Kabupaten Natuna, batas wilayah selatan adalah Kabupaten Lingga, batas barat adalah Kota Tanjungpinang dan Batam serta batas wilayah timur adalah Provinsi Kalimantan Barat.

Jumlah pulau terdiri dari 241 buah pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah yang berpenghuni sedangkan sisanya walaupun belum berpenghuni, namun sudah dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian khususnya kegiatan perkebunan.

Untuk Kabupaten Lingga, secara geografis berada di area yang berbatasan dengan Batam di utara, Laut Bangka di sebelah selatan, Laut Indragiri Hilir di bagian barat dan Laut China Selatan di bagian timur, dengan luas wilayah:

Lautan	43.273,15	km ²
Daratan	2.235,15	km ²
Luas Total	45.508,30	km ²

Jumlah pulau terdiri dari 531 buah pulau besar dan kecil. Hanya 84 buah yang berpenghuni.

2. Pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau

Perekonomian Kepulauan Riau triwulan III-2024 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku (ADHB) mencapai Rp86,88 triliun dan atas dasar harga konstan (ADHK) mencapai Rp51,84 triliun.

Ekonomi Kepulauan Riau pada triwulan III-2024 (y-on-y) tumbuh sebesar 5,02 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan pada triwulan ini didorong oleh kategori Industri Pengolahan yang memiliki andil pertumbuhan sebesar 3,26 persen dan kategori Konstruksi yang memberikan andil pertumbuhan sebesar 0,60 persen. Dari sisi pengeluaran, Komponen Net Ekspor mempunyai andil pertumbuhan sebesar 2,13 persen dan Komponen PK-RT dengan andil sebesar 2,03 persen.

Ekonomi Kepulauan Riau triwulan III-2024 dibandingkan dengan triwulan II-2024 (q-to-q) tumbuh sebesar 0,53 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan ekonomi terutama disebabkan oleh kategori Pertambangan dan Penggalian dengan andil pertumbuhan terbesar sebesar 1,49 persen, diikuti kategori Konstruksi dengan andil pertumbuhan sebesar 0,78 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, komponen Net Ekspor memberikan andil pertumbuhan terbesar yaitu 2,37 persen, diikuti komponen PMTB dengan andil sebesar 0,68 persen.

Sampai dengan triwulan III-2024, secara kumulatif (c-to-c) pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau tumbuh sebesar 4,98 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dalam lingkup regional, PDRB Kepulauan Riau triwulan III-2024 memberikan kontribusi sebesar 7,00 persen terhadap PDRB Pulau Sumatera.

3. Komposisi Pegawai Yang Memadai

a. Sebaran Pegawai Per Unit Kerja

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	Kepala Kantor	1
2	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	8
3	Seksi Penjaminan Kualitas Data	4
4	Seksi Pelayanan	9
5	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan	8
6	Seksi Pengawasan I	5
7	Seksi Pengawasan II	4
8	Seksi Pengawasan III	4
9	Seksi Pengawasan IV	4
10	Seksi Pengawasan V	5
11	Kelompok Jabatan Fungsional	7
12	KP2KP	3
Total		62

b. Sebaran Pendidikan

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	D1	16
2	D3	9
3	D4/S1	27
4	S2	10
Total		62

c. Sebaran Usia

No	Unit Kerja	Jumlah Pegawai
1	<30 tahun	27
2	30-40 tahun	17
3	40-50 tahun	10
4	>50 tahun	8
Total		62

BAB II

Perencanaan Kinerja

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi, KPP Pratama Bintang telah menyusun rencana kinerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Kepala KPP Pratama Bintang yang akan diuraikan secara singkat sesuai dengan sasaran strategis sebagai berikut:

1. **Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal**
Sasaran strategis ini diukur dengan persentase realisasi penerimaan pajak dan persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto untuk optimalisasi penerimaan pajak sesuai target APBN atau APBN-P melalui penyempurnaan regulasi; pelayanan, edukasi, kehumasan, dan Pengawasan Pembayaran Masa; Pengawasan Kepatuhan Material dan penegakan hukum; serta efisiensi proses bisnis di bidang perpajakan.
2. **Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi**
Sasaran strategis ini diukur dengan persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi dan persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) untuk meningkatkan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak pada tahun berjalan baik secara formal maupun material yang mendukung pencapaian penerimaan pajak yang optimal.
3. **Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi**
Sasaran strategis ini diukur dengan persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) meningkatkan *voluntary and enforced tax compliance* Wajib Pajak sebagai tindak lanjut analisis data dalam rangka kegiatan pengawasan dan penegakan hukum atas tahun pajak sebelum tahun pajak berjalan.
4. **Edukasi dan pelayanan yang efektif**
Sasaran strategis ini diukur dengan persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan dan indeks efektivitas penyuluhan dan pelayanan untuk meningkatkan edukasi tentang hak dan kewajiban perpajakan serta pemberitaan dan informasi positif mengenai perpajakan yang dapat menumbuhkan pengertian Wajib Pajak terhadap masalah-masalah perpajakan. Pelayanan yang profesional, terpercaya, transparan, tepat waktu, dan konsisten sesuai aturan yang berlaku.
5. **Pengawasan pembayaran masa yang efektif**
Sasaran strategis ini diukur dengan persentase pengawasan pembayaran masa untuk mengawasi pembayaran masa melalui kegiatan penelitian atas kesesuaian dan ketepatan pembayaran masa pada tahun pajak berjalan sehingga kepatuhan Wajib Pajak meningkat dan penerimaan pajak dapat tercapai optimal.
6. **Pengujian kepatuhan material yang efektif**
Sasaran strategis ini diukur dengan persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak Wajib Pajak, dan persentase penyampaian IDLP. Tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dipergunakan untuk pengawasan kepatuhan material yang efektif yang didukung teknologi informasi yang terintegrasi, data berkualitas, dan probis yang mumpuni, yang dapat dengan mudah dan cepat mendeteksi ketidakpatuhan Wajib Pajak (subjektif maupun objektif) untuk mendorong kepatuhan sukarela.

7. Penegakan hukum yang efektif

Sasaran strategis ini diukur menggunakan persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan, efektivitas Penagihan, dan tingkat efektivitas Pemeriksaan. Tiga Indikator Kinerja Utama (IKU) ini dipergunakan sebagai rangkaian kegiatan penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penagihan, upaya hukum, tindak pidana di bidang perpajakan yang dilaksanakan secara objektif, memberikan kepastian hukum, menimbulkan efek jera, dan mendorong kepatuhan WP. Selain itu juga untuk memastikan efektivitas *law enforcement* dan juga *last enforcement* dalam upaya meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dan juga sebagai *deterrent effect* dalam penegakan hukum.

8. Data dan informasi yang berkualitas

Sasaran strategis ini diukur menggunakan persentase Penyediaan Data Potensi Perpajakan berupa data, informasi, dan insight yang mampu memberikan nilai tambah untuk mendukung pengambilan keputusan.

9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

Sasaran strategis ini diukur menggunakan persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi melalui penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia untuk terwujudnya aparatur pajak yang berintegritas, profesional, memiliki keterikatan dan kebanggaan yang tinggi dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

10. Pengelolaan keuangan yang akuntabel

Sasaran strategis ini diukur dengan persentase kualitas pelaksanaan anggaran dalam hal mengelola keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada *stakeholder*. Dana yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penguatan pengelolaan keuangan menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK.

BAB III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Hasil kinerja KPP Pratama Bintang selama tahun 2024 dapat diuraikan berdasarkan sasaran strategis dan indikator kinerja utama sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target awal tahun, **target addendum** dan realisasi kinerja tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal Tahun 2024 (Triwulan I)	Target Addendum (Triwulan IV)	Realisasi 2024 (Triwulan IV)
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00% = 506.093.521.204	100,00% = 538.110.789.000	100,21% = 539.223.322.822
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	100,00%	102,58%
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00% = 453.728.945.042	100,00% = 491.165.900.000	100,01% = 491.224.567.517
		Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00% = 28.197	100,00%	103,25% = 33.384
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00% = 52.364.576.162	100,00% = 46.944.889.000	102,24% = 47.998.755.305
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas	74,00%	74,00%	118,57%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal Tahun 2024 (Triwulan I)	Target Addendum (Triwulan IV)	Realisasi 2024 (Triwulan IV)
		kegiatan edukasi dan penyuluhan			
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	100,00%	112,93%
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	90,00%	120,00%
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	100,00%	120,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	100,00%	119,94%
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	100,00%	120,00%
7	Penegakan hukum yang efektif	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	100,00%	120,00%
		Tingkat efektivitas Penagihan	75,00%	75,00%	120,00%
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	0,00%
8	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	100,00%	115,00%
		Persentase penghimpunan	55,00%	55,00%	120,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Awal Tahun 2024 (Triwulan I)	Target Addendum (Triwulan IV)	Realisasi 2024 (Triwulan IV)
		data regional dari ILAP			
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	100,00%	100,00%	117,42%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	85,00%	51,09%
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	90,00%	106,04%
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	100,00%	120,00%

Indikator Kinerja Utama yang besarannya melampaui target adalah:

1. Persentase realisasi penerimaan pajak
2. Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
3. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
4. Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
5. Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
6. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
7. Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
8. Persentase pengawasan pembayaran masa
9. Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
10. Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
11. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
12. Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian
13. Tingkat efektivitas Penagihan
14. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
15. Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
16. Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
17. Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
18. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

2. Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 dan tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1.	Penerimaan Pajak Negara Yang Optimal	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,21%	104,27%	118,85%
		Persentase Realisasi Penerimaan <i>Extra Effort</i>	-	-	-
		Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	102,58%	120,00%	-
2.	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	103,25%	99,77%	102,31%
		Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,01%	102,88%	119,42%
3.	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	102,24%	111,65%	117,94%
4.	Edukasi dan pelayanan yang efektif	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	118,57%	84,00%	-
		Persentase efektivitas kegiatan edukasi dan penyuluhan	-	-	80,40%
		Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	112,93%	81,00%	91,96%
5.	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	Persentase pengawasan pembayaran masa	120,00%	115,00%	101,82%
6.	Pengujian kepatuhan material yang efektif	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	120,00%	148,10%	120,00%
		Persentase penyelesaian pemeriksaan oleh Petugas Pemeriksa Pajak	-	-	100,00%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Persentase penyampaian IDLP	-	-	150,00%
		Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	119,94%	119,49%	-
		Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	120,00%	-	-
7.	Penegakan hukum yang efektif	Persentase nilai ketetapan dibayar pada tahun berjalan	-	-	379,02%
		Tingkat efektivitas penagihan	120,00%	115,13%	118,56%
		Tingkat efektivitas Pemeriksaan dan penilaian	120,00%	100,34%	95,16%
		Persentase tindak lanjut usulan pemeriksaan dari kegiatan pengawasan	-	72,73%	-
		Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	0%	-	-
8.	Data dan Informasi yang berkualitas	Persentase penyediaan data potensi perpajakan	-	-	126,26%
		Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	115,00%	112,89%	-
		Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	120,00%	92,42%	-
9.	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Kompetensi	-	100,00%	100,00%
		Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM	117,42%	-	-
		Persentase Efektivitas Dialog Kinerja Organisasi dan Rencana Mitigasi Risiko yang selesai dijalankan	-	100.00%	100.00%
		Indeks Penilaian Integritas Unit	51,09%	94.81	93,11

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	106,04%	-	-
		Indeks efektivitas pelaksanaan FGD Pejabat Administrator	-	-	100.00
10.	Pengelolaan Keuangan yang optimal (2022)	Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran	-	-	93.51%
	Penguatan pengelolaan keuangan yang akuntabel	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	120,00%	96.49	-

3. Upaya- upaya **extra effort** yang dilakukan dalam rangka pencapaian target kinerja
 - Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan kelurahan/desa guna penyusunan peta kerja/ mapping wilayah
 - Menyusun Tim Khusus untuk melakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang menjadi pemenang tender LPSE
 - Pengawasan Wajib Pajak kewilayahan secara tematik
 - Forum komunikasi dengan Bendahara secara berkala (triwulanan)
 - Melakukan bedah Wajib Pajak kewilayahan secara tematik
 - Melakukan Kegiatan Pengumpulan Data dan Lapangan (KPDL) di pusat-pusat kegiatan ekonomi
 - Menggandeng instansi terkait dalam rangka meningkatkan kepatuhan penyampaian SPT Wajib Pajak. Misalnya: kerja sama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
 - Melakukan pengawasan Wajib Pajak Group/ Afiliasi
 - Melakukan sosialisasi kewajiban Wajib Pajak Orang Pribadi, Badan, dan Bendahara
 - Mengoptimalkan data internal dan eksternal dalam rangka penggalian potensi
 - Fokus pada penelitian kepada WP OP yang tidak mengikuti program PPS, pengawasan perpajakan proyek baru di wilayah KPP Pratama Bintan, dan himbauan berbasis *transfer pricing*
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja.

Berikut ini akan diuraikan indikator-indikator kinerja yang melampaui target di tahun 2024 berikut faktor-faktor pendukungnya.

- 1) Persentase realisasi penerimaan pajak
 - Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
 - Aktif menindaklanjuti data-data hasil analisa, data yang tersedia di approweb, data pihak ketiga dan informasi dari media lainnya.
 - Meningkatkan pengawasan terhadap Wajib Pajak yang memiliki potensi berupa penjualan aset tanah.

- Penggalan potensi berbasis Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan dengan skala prioritas.
 - Sasaran Strategis Penerimaan Negara dari sektor pajak yang optimal di dalam Renstra DJP Tahun 2021-2024 terdiri dari persentase realisasi penerimaan pajak, dan Tingkat efektivitas pengawasan dan penegakan hukum perpajakan, dua indikator kinerja tersebut telah berhasil tercapai melampaui target di tahun 2024 di KPP Pratama Bintan. Diharapkan dengan tercapainya target tersebut dapat menjadi semangat untuk KPP Pratama Bintan untuk bisa terus berkontribusi dalam mencapai setiap target dalam Sasaran Strategis DJP Sepanjang Tahun 2021-2024.
- 2) Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto
- Aktif menindaklanjuti data-data hasil analisa, data yang tersedia di SIDJP, data hasil turunan dari kanwil, data dari pihak ketiga dan informasi dari media lainnya.
 - Terus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kewajiban perpajakan.
 - Melakukan pengawasan rutin atas pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak.
 - Menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
 - Penggalan potensi berbasis Wajib Pajak Strategis dan Kewilayahan dengan skala prioritas.
- 3) Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
- Mengadakan penyuluhan *one on one* oleh penyuluh dan pelaksana Seksi Pelayanan
 - Membuka layanan konsultasi secara online
 - Mengadakan penyuluhan *one to many* ke beberapa daerah
 - Mengadakan kelas pajak
 - Meningkatkan pengawasan dengan cara mengarahkan AR untuk: membuat imbauan, mengirim *SMS/WA message* atau menelepon untuk mengingatkan WP, menerbitkan Surat Teguran, menerbitkan STP melakukan visit konseling.
- 4) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
- Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
 - Aktif menindaklanjuti data-data hasil analisa, data yang tersedia di SIDJP, data hasil turunan dari kanwil, data dari pihak ketiga dan informasi dari media lainnya.
 - Melakukan pengawasan rutin atas pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak.
 - Menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.
- 5) Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
- Pengawasan dan pendampingan yang dilakukan secara terus menerus terhadap pemenuhan kewajiban pembayaran pajak oleh Wajib Pajak.
 - Aktif menindaklanjuti data-data hasil analisa, data yang tersedia di SIDJP, data hasil turunan dari kanwil, data dari pihak ketiga dan informasi dari media lainnya.
 - Melakukan pengawasan rutin atas pelaporan dan pembayaran Wajib Pajak.

- 6) Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
 - Pembentukan Tim Penyuluh KPP Pratama Bintang
 - Pembuatan Rencana Kerja Periodik pada awal tahun
 - Pelaksanaan Kelas Pajak, Bimtek baik daring maupun luring kepada Wajib Pajak
 - Pelaksanaan Bimtek untuk peningkatan pengetahuan perpajakan
 - Pelaksanaan edukasi perpajakan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan (tema 2)
 - Pelaksanaan edukasi perpajakan kepada guru SD dan SMP, berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat
 - Pelaksanaan edukasi perpajakan untuk sekolah PAUD
 - Melaksanakan kegiatan edukasi dan BDS yang bersifat tematik
- 7) Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
 - Mengirim daftar nama WP sebagai calon responden survey ke KPDJP
 - Melakukan koordinasi dengan AR dan fungsional untuk memastikan update data channel komunikasi saat berinteraksi dengan WP
 - Aktif memberikan edukasi khususnya saat WP mengajukan permohonan terkait apabila WP tersebut terpilih sebagai responden survey
 - Memberikan pelayanan prima kepada WP sesuai dengan standar pelayanan
 - Solusi alternatif media penyuluhan saat daring tidak hanya merujuk pada satu aplikasi tertentu
- 8) Persentase Pengawasan Pembayaran Masa
 - Melakukan data matching, dinamisasi PPh Pasal 25 dan penerbitan STP secara berkesinambungan sepanjang tahun.
- 9) Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
 - Melaksanakan kegiatan pengawasan atas pembayaran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak
 - Menerbitkan SP2DK secara masif kepada pusat-pusat perekonomian yang berpotensi atas kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang belum terpenuhi
 - Melakukan visit kepada Wajib Pajak terkait Surat Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan yang tidak sampai atau kempas.
 - Menerbitkan himbauan pelaporan SPT Tahunan dan SPT Masa yang ditindaklanjuti dengan konsultasi dengan Wajib Pajak.
 - Melakukan pengawasan dan analisa atas pembayaran dan pelaporan dari SIDJP, MPN-info, Approweb dan Apportal
- 10) Tingkat Efektivitas Penagihan
 - Mengirimkan surat himbauan pelunasan dan/atau surat konfirmasi utang pajak kepada Wajib Pajak.
 - Melakukan konfirmasi rekening ke perbankan secara random. Segera menindaklanjuti pemblokiran rekening Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak jika ditemukan.
- 11) Tingkat Efektivitas Pemeriksaan dan Penilaian
 - Membuat ND ke Seksi Pengawasan I,II,III,IV, dan V untuk mengingatkan dan kemudian bersama-sama melakukan pembahasan untuk menggali data dan potensi WP yang layak dilakukan Pemeriksaan.

- Kolaborasi dengan Seksi PKD untuk menyajikan data-data potensi yang kemudian diserahkan kepada Seksi Pengawasan.
 - Melakukan kegiatan bedah WP sebelum penetapan usulan DSPP agar yang diusulkan berkualitas.
- 12) Persentase penyediaan data potensi perpajakan
- Menginput data alket menggunakan menu rekam Alket di Aplikasi Alket.
 - Melakukan pengawasan dan analisa atas pembayaran maupun pelaporan dari MPN-info, Approweb dan Apportal.
- 13) Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebidanan SDM
- Perencanaan jadwal dan materi materi ujian.
 - Persiapan sarana dan prasarana serta materi untuk menunjang pelaksanaan ujian.
- 14) Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko
- Melaksanakan DKRO sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
 - Menyusun Laporan Pelaksanaan Dialog Kerja dan Risiko Organisasi yang sesuai dengan Format aturan yang ada dan memenuhi unsur-unsur penilaian Dialog Kinerja dan Risiko Organisasi.
 - Mengawasi jalannya Mitigasi Risiko yang sudah dibuat.
- 15) Indeks Penilaian Integrasi Unit
- Mengkoordinasikan pelaksanaan survey dengan seksi-seksi terkait yakni pelayanan, pengawasan, pemeriksaan dan penagihan pajak.
 - Meningkatkan kepuasan wajib pajak sebagai *stakeholder* KPP.
- 16) Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran
- Membuat rencana kerja yang efektif dan efisien dari setiap pagu anggaran.
 - Melakukan rapat koordinasi dengan tim pengelola keuangan secara rutin untuk membahas progres penyerapan.
 - Melakukan koordinasi secara rutin ke Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam rangka revisi DIPA.
 - Memperhatikan capaian output yang memiliki pengaruh signifikan terhadap nilai efisiensi, monitoring penyerapan anggaran dan konsistensi rencana penarikan dana.
5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- Penghematan penggunaan listrik dan air, sesuai dengan keperluan untuk menunjang pelaksanaan pekerjaan yang optimal.
 - Penggunaan metode kerja berbasis aplikasi, misalnya untuk persuratan yang menggunakan aplikasi Nadine sehingga dapat meminimalisir dalam jumlah yang sangat signifikan penggunaan kertas, ATK dan biaya pos/surat ke pihak lain.
 - Melakukan himbauan untuk mematikan perangkat elektronik masing masing pegawai sebelum pulang kerja untuk menjaga agar perangkat elektronik tidak mengalami kerusakan.
 - Himbauan efisiensi dalam penggunaan tissue toilet sebagai bentuk kepedulian lingkungan (*Go Green*).

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja

Dalam penyusunan pencapaian kinerja KPP Pratama Bintan tahun 2024 terdapat pelaksanaan Mitigasi Risiko yang berfungsi untuk mengoptimalkan realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target yang telah ditetapkan, meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, pelayanan kepada Wajib Pajak yang optimal, peningkatan kualitas SDM organisasi, pengelolaan anggaran yang efisien serta tugas lainnya yang mendukung pencapaian organisasi.

Realisasi Pelaksanaan Mitigasi Risiko KPP Pratama Bintan Tahun 2024 sampai dengan Triwulan IV berhasil dijalankan mencapai 100% dari 19 banyaknya Prioritas Risiko.

7. Rencana aksi ke depan

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Status
		Penanggung Jawab	Pendukung	
1	Kerjasama antara Seksi Pengawasan dengan Seksi PKD untuk memberikan data-data yang dimintakan.	Seksi PKD dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Seksi Penjaminan Kualitas Data (PKD) dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Proses
2	Melakukan pengawasan serta mencari informasi secara komprehensif terhadap Wajib Pajak. Meliputi pencarian informasi di pihak internal maupun eksternal dalam rangka pengumpulan data.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V, Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3), Seksi Penjaminan Kualitas Data, dan Seksi Pelayanan (terkait penyuluhan)	Proses
3	Terus Melakukan Penggalian Potensi Perpajakan salah satunya dengan Menerbitkan STP bagi Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya dengan tepat waktu.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Proses
4	Melaksanakan kegiatan sosialisasi/penyuluhan perpajakan melalui kelas pajak, seminar, workshop, atau kegiatan penyuluhan perpajakan lainnya baik melalui media cetak, media luar ruang, media elektronik, maupun media penyuluhan lainnya.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V dan Seksi Pelayanan	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V, Seksi Pelayanan, Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal, dan Seksi PKD	Proses

No.	Rencana Aksi	Unit Penanggung Jawab		Status
		Penanggung Jawab	Pendukung	
5	Memandu tata cara pelaporan menggunakan e-Filing di kantor pajak bagi WP yang ingin melaporkan SPT.	Seksi Pelayanan	Seksi Pelayanan dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Proses
6	Mengusulkan agar AR menghimbau WP untuk lapor secara e-filing bagi yang belum melaporkan SPT Tahunan	Seksi Pelayanan	Seksi Pelayanan dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Proses
7	Senantiasa melakukan pengawasan atas kepatuhan WP dalam melakukan kewajiban perpajakannya salah satunya dengan Melakukan komunikasi dengan Wajib Pajak mengenai kendala yang ditemui dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V dan Seksi Pelayanan	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V, Seksi Pelayanan, dan Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Proses
8	Melakukan koordinasi atau rapat antara seksi Pengawasan dan Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) sehingga tidak terjadi perbedaan penerapan aturan perpajakan terkait Pemeriksaan Pajak.	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) dan Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Proses
9	Melaksanakan DKRO sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Dan mengirimkan Format Laporan hasil DKRO sesuai dengan yang ditetapkan di Manual IKU pada laporan NKO Triwulan.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Seluruh Seksi di KPP Pratama Bintan	Proses
10	Melaksanakan rencana kerja yang efektif dan efisien dari setiap pagu anggaran.	Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal	Seluruh Seksi di KPP Pratama Bintan	Proses
11	Menyiapkan penyampaian IDLP tahun 2025	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Seksi Pengawasan I, II, III, IV dan V	Proses

B. Realisasi Anggaran

Indikator Kinerja Utama terkait dengan anggaran adalah indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran. Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran merupakan hasil penjumlahan dari 50% dari nilai kinerja atas perencanaan anggaran pada SMART dan 50% dari nilai kinerja atas pelaksanaan anggaran. Penghitungan Nilai Efisiensi pada Aplikasi SMART DJA menggunakan ketentuan persetujuan Standar Biaya Keluaran Umum berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No 113 Tahun 2023 dan berdasarkan Nota Dinas dari Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-777/SJ.1/2024 tanggal 25 Juli 2024 tentang

Penetapan Rincian Output yang Diwajibkan Menggunakan Standar Biaya Keluaran Umum Sebagai Dasar Penilaian Kinerja Perencanaan Anggaran TA 2024 ditetapkan untuk penghitungan efisiensi satuan kerja Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak dilingkungan DJP menggunakan RO Layanan Kehumasan dan Informasi. Sehingga RO yang ada pada satuan kerja Kanwil dan KPP untuk dilakukan perhitungan efisiensi adalah pada RO Layanan Penyuluhan dan Kehumasan Perpajakan.

Dengan formula tersebut, IKU realisasi anggaran KPP Pratama Bintang mencapai 120,00 dari target sebesar 100,00. Perincian pencapaian penyerapan anggaran dapat disajikan dengan tabel sebagai berikut:

Unsur IKU	Rumus	Capaian	Indeks Capaian	Isu Utama dan Implikasi	Tindakan yang telah dilaksanakan	Rekomendasi Rencana Aksi
	(a)	(b)	(c)=(a)*(b)			
Capaian Rincian Output	50%	100	50	Tercapainya target berdasarkan tugas dan fungsi		Pembuatan rencana kerja masing-masing seksi
Efisiensi	50%	100	50			Melakukan penetapan prioritas dalam penggunaan anggaran
SMART	50,00%	100	50,00			
IKPA	50,00%	96,00	48,00			
IKU Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran			98,00			Melakukan perbaikan perencanaan
Target IKU			95.00			Melakukan monev atas pelaksanaan anggaran
Indeks Capaian IKU Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran			120,00			

IKU Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tahun 2024 KPP Pratama Bintang mencapai 120,00. Sebagai tambahan, dengan pola belanja tersebut, KPP Pratama Bintang melakukan 19 kali revisi DIPA untuk mempertahankan kecukupan masing-masing belanja. Jumlah revisi yang cukup banyak disebabkan karena kurangnya perencanaan pengeluaran

yang disebabkan tidak adanya perencanaan dari masing-masing unit eselon IV pengguna dana DIPA.

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian dalam proses penyerapan anggaran di KPP Pratama Bintan adalah sebagai berikut:

1. perlunya peningkatan sinergi antar unit eselon IV terutama dalam menyusun anggaran belanja perjalanan dinas dan percetakan, sehingga tidak terjadi kelebihan dana SPD;
2. Sinergi antara PBJ dan PPK dalam pelaksanaan belanja dan pengadaan;
3. Pengawasan KPA maupun PPSPM yang lebih ketat terhadap efisiensi dan efektivitas usulan belanja perjalanan dinas (SPD) dan belanja lainnya;
4. Koordinasi antar tim pengelola keuangan masih bisa ditingkatkan lagi dengan melaksanakan rapat koordinasi untuk penyerapan anggaran yang lebih efektif.

BAB IV

Penutup

A. Simpulan Umum Capaian Kinerja Organisasi

Secara umum kinerja KPP Pratama Bintang sudah bagus dengan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) pada tahun 2024 ini sebesar 104,65.

Hampir semua indikator kinerja yang menjadi penentu besaran NKO KPP Pratama Bintang tercapai pada tahun 2024 ini. Terdapat dua IKU yang tidak tercapai yaitu Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan dan Indeks Penilaian Integritas Unit. Hal ini karena Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dapat dioptimalkan sehingga IKU tersebut hanya mendapatkan nilai realisasi 0% dari target IKU 100% dan Indeks Penilaian Integritas Unit hanya mendapatkan realisasi 51,09% dari target IKU 85,00%. Dengan demikian, capaian IKU tersebut hanya mendapatkan nilai 0% dan 51,09%.

Faktor internal yang cukup signifikan dalam mendukung keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja adalah motivasi pegawai serta sinergi antar seksi dan perlunya peningkatan koordinasi dan kepemimpinan di setiap level unit kerja.

Faktor eksternal yang sangat dominan dalam keberhasilan maupun kegagalan dari pencapaian kinerja adalah pertumbuhan ekonomi tahun 2024, realisasi penyerapan belanja satker-satker di wilayah kerja KPP Pratama Bintang, dan dukungan dari pemerintah daerah terutama dalam hal penyediaan data dan informasi.

B. Rencana Untuk Peningkatan Kinerja Organisasi

Perlu diambil langkah-langkah strategis terkait faktor-faktor internal dan eksternal untuk mencapai target di tahun 2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan penggalian data dengan memperbaiki sinergitas dengan pihak eksternal dan internal.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas himbauan melalui pemanfaatan seluruh potensi data dan informasi yang ada dan menindaklanjutinya hingga tuntas.
3. Percepatan proses penyelesaian tunggakan pemeriksaan dan mengalihkan fokus pemeriksaan kepada Wajib Pajak berisiko tinggi dan mempunyai potensi tinggi.
4. Memperbaiki database dan manajemen penagihan dengan mengklasifikasikan tunggakan lancar dan macet, sehingga fokus kegiatan penagihan bisa dilakukan dengan lebih terarah dan potensi pencairan lebih tinggi.
5. Mengintensifkan penagihan aktif.
6. Melakukan optimalisasi tenaga pemeriksa (fungsional maupun non fungsional) melalui pembuatan prioritas pemeriksaan berdasarkan tingkat risiko dan potensi ekonomi dari wajib pajak dan peningkatan kapasitas tenaga pemeriksa melalui IHT dan Diklat.
7. Meningkatkan motivasi dan kapasitas *account representative* dalam rangka melakukan penggalian potensi.
8. Melakukan optimalisasi tenaga penyuluh (fungsional penyuluh) melalui perencanaan kegiatan edukasi dan penyuluhan kepada wajib pajak agar lebih komprehensif dan menyeluruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
9. Mengoptimalkan dukungan seksi-seksi *supporting* dalam rangka memaksimalkan kelancaran tugas dan fungsi seksi-seksi teknis melakukan koordinasi dengan satker-satker eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung menunjang tugas dan fungsi pengamanan penerimaan pajak sedini mungkin di awal tahun.

10. Pengiriman usulan rotasi pegawai baik regional dan nasional terutama untuk pegawai yang berkinerja baik dan sudah memenuhi syarat jangka waktu.
11. Pengelolaan kinerja yang lebih transparan dan objektif.
12. Peningkatan peran Unit Kepatuhan Internal dalam membantu Kepala Kantor untuk mengawasi penerapan SOP dengan peran yang lebih independen dan objektif.

Tanjungpinang, 23 Januari 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
Ika Retnaningtyas
NIP 19790807 200212 2 001



LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024